

TANDA PERSETUJUAN
UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM

ABSTRACT

PARWITO (6905031215), LEGAL APPROACH ANALYSIS ON THE REGULATORY CONSISTENCY IN TAXZATION, x additional pages + 98 content pages + 2 pictures + 83 annexes + 42 literatures (1971-2007)

Public administration does not only provide services for the society, but also does regulate the society. This comes a consequence over the fact that service provision for certain society members will definitely limit other members' rights. Thus, service provision and regulation in public administration shall be in sound interdependency. Tax plays a very important role in this as a revenue source for the state to finance public administration's expenses. Consequently, tax as part of public administration absolutely needs legal basis as well.

This study starts from indications that a number of taxation regulations are inconsistent from the point of justice, legal certainty, and regulatory hierarchy. Shall these indications be proven, such regulations would potentially raise uncertainty for both taxpayers and tax authority. Regulatory inconsistency could plummet legal certainty in taxation that would further distort the important role and fuction of tax in national development. This condition is perilous since unlawful deeds are still able to find loopholes even in a sound regulatory environment.

This study will analyze the regulatory consistency in taxation through legal approach in public administration. The factors that presumably contribute to the inconsistency, its potential impacts, and a range of possible solutions will be explored further through this study.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

PARWITO (6905031215), ANALISIS PENDEKATAN HUKUM TERHADAP KESELARASAN ANTAR PERUNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN, X halaman tambahan + 98 halaman isi + 2 gambar + 83 lampiran + 42 kepustakaan (1971 – 2007)

Administrasi publik tidak hanya menyediakan pelayanan bagi masyarakat, namun juga melakukan pengaturan terhadap masyarakat sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa penyediaan pelayanan bagi anggota masyarakat akan membatasi sebagian masyarakat yang lainnya. Sehingga, penyediaan pelayanan dan pengaturan masyarakat dalam administrasi public harus saling terkait. Pajak Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi kepentingan penyelenggaraan administrasi public tersebut dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pajak sebagai bagian dari administrasi public mutlak memiliki dasar peraturan perundangan pula.

Penelitian ini mensinyalir adanya sejumlah peraturan di bidang perpajakan yang tidak selaras, baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun hierarki perundang-undangan. Jika sinyalemen ini terbukti, peraturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada wajib pajak dan aparat pelaksana administrasi pajak di lapangan. Ketidaksiharasan antar peraturan perpajakan dapat menurunkan tingkat dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan membuka potensi bagi terdistorsinya fungsi dan peran penting pajak bagi pembangunan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam keadaan peraturan yang serba pasti sekalipun, masih dimungkinkan timbulnya penyimpangan dalam tataran pelaksanaan, apalagi manakala penyimpangan itu sudah timbul pada tataran peraturannya.

Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis keselarasan antar peraturan perundangan di bidang perpajakan melalui pendekatan hukum dalam administrasi publik. Faktor-faktor yang memungkinkan menimbulkan adanya ketidaksiharasan tersebut, kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang mungkin diterapkan merupakan hal-hal yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis terhadap tiga peraturan di bidang perpajakan, yang diperkaya dengan pendapat para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan perpajakan—paling yang menjadi objek penelitian—tidak tiga terbukti telah menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau tidak memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Terhadap ketiga peraturan yang terbukti tidak sesuai dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, pemerintah disarankan untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut.